



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKENCANA NOMOR 2 TELEPON 022 - 4232338 - 4232339 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 027/Kep.1146-BKAD/2021

TENTANG

STANDARISASI HARGA TERTINGGI PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Harga Tertinggi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.612-BPKA/2020 tentang Perubahan Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya berdasarkan hasil survey terjadi perubahan terhadap Satuan Harga sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standarisasi Harga Tertinggi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standarisasi Harga Tertinggi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEDUA** : Standarisasi Harga Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya mencakup biaya perjalanan dinas mulai Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Standarisasi Harga Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.612-BPKA/2020 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Ananda Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

BELANJA PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, dan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat/daerah meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas dapat dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang.

Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - 1) Yang berwenang untuk menandatangani adalah:
 - a) Wali Kota untuk Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
 - b) Wakil Wali Kota untuk Sekretaris Daerah apabila Wali Kota berhalangan; dan
 - c) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - 2) Sekretaris Daerah untuk para Asisten Daerah, Kepala Bagian dan Camat;
 - 3) Atasan Langsung Pejabat Satu Tingkat atau Lebih untuk:
 - a) Kepala Badan

- b) Kepala Dinas/Sekretaris DPRD; dan
 - c) Kepala Kantor.
- 4) Asisten untuk pejabat kepala sub bagian, dan pejabat fungsional/pelaksana yang berada di lingkungannya;
 - 5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Kepala Bidang/Kepala Sub Dinas/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dan semua pegawai di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- c. Dalam Pengelolaan SPPD tidak dapat dibenarkan seorang Pegawai Negeri Sipil mendapat 2 (dua) jenis SPPD dalam waktu yang bersamaan;
 - d. Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu paling sedikit 8 (delapan) jam dapat diberikan Uang Harian;
 - e. Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak boleh melebihi 5 (lima) hari kalender kecuali untuk keperluan diklat seminar;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - g. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - h. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - i. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - j. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - k. Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
2. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. Biaya Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

3. Untuk Perjalanan Dinas bagi suami/istri Pejabat Negara yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan di Kota Bandung, maka disetarakan dengan Pejabat Eselon III/Golongan IV.
4. Untuk Perjalanan Dinas bagi Non PNS disetarakan dengan Golongan I/II.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Keterangan Tambahan :

- a) Visum/penandatanganan perjalanan dinas dilakukan di tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke PD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB/Cabang Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan).
- b) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Jawa Barat, misal dari tempat kedudukan Kantor ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat diberikan uang harian sebesar Rp. 430.000.
- c) Uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten/kota, misal dari tempat kedudukan kantor di Kota Bandung dan ditugaskan melakukan kegiatan dilapangan/rapat/seminar/tugas lainnya di Kota Bandung, jika lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 170.000.

d) Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota kurang dari 8 (delapan) jam tidak diberikan uang harian.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel di bawah ini:

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari
8 (Delapan) Jam, Diklat, Dalam Daerah Provinsi Jawa Barat
Serta Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
				DALAM KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
1	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
1	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
1	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
1	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
1	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
1	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
1	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
1	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
1	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
2	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
2	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
2	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
2	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
2	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
2	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
2	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
2	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
2	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
3	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
3	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wali Kota Bandung dan Ketua DPRD Kota Bandung	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	Wakil Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3	Sekretaris Daerah Kota Bandung, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kota Bandung	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / GOLONGAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / GOLONGAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. Moda Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan Klasifikasi sebagai berikut:

Golongan A : Wali Kota Bandung dan Ketua DPRD

Golongan B : Wakil Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPRD

Golongan C : Sekretaris Daerah Kota Bandung, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kota Bandung

Golongan D : Pejabat Eselon III

Golongan E : Pejabat Eselon IV

Golongan F : Pelaksana

No	Jabatan	Jenis dan Kelas Angkutan			
		Pesawat Udara	Kereta Api/Bus	Kapal Laut	Angkutan Darat Lainnya/BBM
1	Golongan A dan Golongan B	Bisnis	Eksekutif/Priority	Kelas I B	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Golongan C	Ekonomi	Eksekutif/Priority	Kelas II A	
3	Golongan D	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	
4	Golongan E	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	
5	Golongan F	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	

5. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI
PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.825.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGGULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000,00	Rp 1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000,00	Rp 7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000,00	Rp 3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000,00	Rp 6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000,00	Rp 2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000,00	Rp 2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000,00	Rp 4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000,00	Rp 5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000,00	Rp 4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000,00	Rp 4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000,00	Rp 4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000,00	Rp 4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000,00	Rp 6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000,00	Rp 4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000,00	Rp 4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000,00	Rp 4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000,00	Rp 3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000,00	Rp 6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000,00	Rp 4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000,00	Rp 3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000,00	Rp 6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000,00	Rp 4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000,00	Rp 3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000,00	Rp 3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000,00	Rp 3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000,00	Rp 7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000,00	Rp 11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000,00	Rp 10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	Rp 9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000,00	Rp 8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000,00	Rp 9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000,00	Rp 2.481.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000,00	Rp 3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	Rp 5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000,00	Rp 4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000,00	Rp 4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000,00	Rp 3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000,00	Rp 4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000,00	Rp 7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp 12.953.000,00	Rp 7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000,00	Rp 5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000,00	Rp 3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000,00	Rp 4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000,00	Rp 5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000,00	Rp 5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000,00	Rp 5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000,00	Rp 5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000,00	Rp 9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000,00	Rp 8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000,00	Rp 4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000,00	Rp 4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000,00	Rp 6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000,00	Rp 3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000,00	Rp 4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000,00	Rp 5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000,00	Rp 2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000,00	Rp 6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000,00	Rp 5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000,00	Rp 4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000,00	Rp 4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	Rp 8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000,00	Rp 9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	Rp 5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000,00	Rp 6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000,00	Rp 4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000,00	Rp 4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000,00	Rp 3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000,00	Rp 4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000,00	Rp 8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000,00	Rp 7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000,00	Rp 6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.055.000,00	Rp 6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000,00	Rp 5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000,00	Rp 5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000,00	Rp 8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000,00	Rp 5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000,00	Rp 4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000,00	Rp 4.803.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
240	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000,00	Rp 6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00	Rp 7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000,00	Rp 2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000,00	Rp 2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000,00	Rp 4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000,00	Rp 4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000,00	Rp 4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000,00	Rp 4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000,00	Rp 2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00	Rp 5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000,00	Rp 9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000,00	Rp 5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000,00	Rp 3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000,00	Rp 4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000,00	Rp 4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000,00	Rp 8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000,00	Rp 4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000,00	Rp 4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000,00	Rp 4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000,00	Rp 5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000,00	Rp 4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000,00	Rp 4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000,00	Rp 4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000,00	Rp 3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000,00	Rp 4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000,00	Rp 4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000,00	Rp 5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000,00	Rp 3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000,00	Rp 3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000,00	Rp 3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000,00	Rp 8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp 1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000,00	Rp 1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000,00	Rp 4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000,00	Rp 3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000,00	Rp 3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000,00	Rp 3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000,00	Rp 4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000,00	Rp 5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000,00	Rp 4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000,00	Rp 3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000,00	Rp 3.936.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000,00	Rp 3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000,00	Rp 3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000,00	Rp 7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000,00	Rp 3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000,00	Rp 6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Adapun biaya tambahan untuk Bagasi pesawat adalah paling banyak 20 Kg (dua puluh kilogram), dibayarkan secara biaya riil dengan sistem *reimbursement*.

- 1) Satuan biaya tiket moda transportasi darat kereta api/bus dll untuk perjalanan dinas dalam Negeri dibayarkan sesuai biaya riil.
- 2) Satuan biaya tiket Kapal Laut untuk perjalanan dinas dalam Negeri dibayarkan sesuai biaya riil.
- 3) Satuan biaya angkutan darat lainnya/BBM untuk perjalanan dinas dalam Negeri disesuaikan dengan kebutuhan, adalah sebagai berikut:

No	Jarak Tempuh	Satuan	Kebutuhan BBM	
			Jenis	Banyaknya
1	0 – 200 KM	Sekali jalan/ Kendaraan	Pertamax	25 Lt
2	201 – 400 KM			50 Lt
3	> 400 KM			75 Lt

- 4) Biaya tol untuk perjalanan dinas dalam Negeri disesuaikan dengan jarak tempuh dan dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- 5) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT (Kertajati) Bandung (Husein Sastranegara)	Orang/Kali Orang/Kali	Rp 166.000,00 Rp 60.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Adapun perjalanan dilakukan secara bersama sama (rombongan) dapat melakukan sharing dengan yang lainnya sehingga dapat dilaksanakan dalam 1 moda transportasi.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung ke Bandara BIJB Kertajati; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kertajati ke tempat kedudukan (Bandung).

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAWA BARAT			
1	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000
2	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
3	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
4	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000
5	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000
6	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000
7	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000
8	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000
9	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000
10	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000
11	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000
12	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000
13	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000
14	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000
15	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000
16	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000
17	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000
18	Bandung	Kab. Tasik	Orang/Kali	Rp 245.000
19	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000
20	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
21	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000
22	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000
23	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000
24	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
25	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000
26	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000

5. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara bersama-sama (bentuk rombongan) dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) moda transportasi dan 1 (satu) penginapan/hotel dengan klasifikasi kamar berbeda.

1) Pengklasifikasian kelas kamar dan satuan biaya penginapan untuk Pejabat eselon IV/Golongan III ke bawah dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan secara bersama-sama (bentuk rombongan) dapat dikecualikan, sehingga Untuk biaya penginapan diperbolehkan menggunakan klasifikasi kelas kamar dan satuan biaya penginapan

terendah menyesuaikan lokasi penginapan Golongan di atasnya ataupun melakukan sharing kamar dengan golongan yang setara.

- 2) Dalam hal fasilitas penginapan Hotel tidak dipergunakan, maka dilakukan penggantian biaya yang disesuaikan daerah tujuan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
6. Bukti-bukti pengeluaran atas biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
7. Khusus untuk Protokol Pemerintah Daerah Kota Bandung, para Ajudan dan para Sekretaris Pribadi, moda transportasi dan penginapan/hotel mengikuti pimpinan dengan menggunakan klasifikasi kamar berbeda.
7. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peratiran Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Negeri adalah Wali Kota.
- c. Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat digunakan sebagai uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk Negara yang tidak tercantum, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.

d. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam US\$)

Satuan Biaya diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri secara pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri dibayarkan sesuai biaya riil.

e. Tarif penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Golongan A dan B dapat disesuaikan dengan biaya riil.

f. Apabila Negara tujuan memberikan salah satu atau lebih fasilitas berupa uang saku/uang makan/transportasi lokasi/biaya penginapan, maka persentase (%) uang harian yang diperoleh sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

d. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Penggolongan Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri:

Golongan A	: Wali Kota Bandung dan Ketua DPRD
Golongan B	: Wakil Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPRD
Golongan C	: Sekretaris Daerah Kota Bandung, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kota Bandung
Golongan D	: Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Non PNS

Berikut adalah satuan uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Pemerintah Kota Bandung:

(dalam US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
Amerika Utara						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
Amerika Selatan						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
Amerika Tengah						
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
Eropa Barat						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
Eropa Utara						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
Eropa Selatan						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
Eropa Timur						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
Afrika Timur						
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	274	293
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
Afrika Utara						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	481	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
Asia Timur						
69	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	OH	392	325	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Asia Pasifik						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Klasifikasi moda transportasi pesawat untuk perjalanan dinas luar negeri, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi Tiket
1	Golongan A	Tarif Eksekutif
2	Golongan B	Tarif Bisnis
3	Golongan C	Tarif Ekonomi
4	Golongan D	Tarif Ekonomi

Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif Bisnis.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar Negeri (Pulang-Pergi), adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

No	Kota	Satuan	Besaran		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
Amerika Utara					
1	Chicago	OK	12.733	6.891	3.662
2	Houston	OK	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	OK	11.411	5.925	3.242
4	New York	OK	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	OK	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	OK	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	OK	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	OK	10.902	7.458	3.277
9	Washington	OK	15.150	8.652	3.930

No	Kota	Satuan	Besaran		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
Amerika Selatan					
10	Bogota	OK	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	OK	16.393	11.518	5.970
12	Boenes Aires	OK	23.000	15.300	10.400
13	Caradas	OK	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	OK	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	OK	21.874	15.539	8.900
16	Quito	OK	17.325	16.269	12.127
17	Lima	OK	8.263	8.263	5.038
Amerika Tengah					
18	Mexico City	OK	11.822	7.831	3.966
19	Havana	OK	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	OK	15.532	9.306	6.195
Eropa Barat					
21	Cienna	OK	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	OK	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	OK	10.850	5.074	3.541
24	Paris	OK	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	OK	10.277	6.126	3.959
26	Bern	OK	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	OK	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	OK	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	OK	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	OK	8.216	5.898	3.331
31	Den Hagg	OK	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	OK	7.660	4.037	1.065
Eropa Utara					
33	Copenhagen	OK	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	OK	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	OK	9.917	5.506	3.433
36	London	OK	11.410	7.293	4.153
37	Olso	OK	9.856	4.773	4.049
Eropa Selatan					
38	Sarajewo	OK	11.778	7.129	6.033
39	Zegreb	OK	16.974	10.177	5.182
40	Athens	OK	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	OK	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	OK	10.393	4.767	3.631
43	Rome	OK	10.000	6.000	4.500
44	Beogard	OK	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	OK	10.000	6.000	4.500
Eropa Timur					
46	Bratislava	OK	7.125	4.423	3.842
47	Burcharest	OK	8.839	4.982	4.113
48	Keiv	OK	10.860	6.029	5.193

No	Kota	Satuan	Besaran		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
49	Moscow	OK	9.537	7.206	5.143
50	Prague	OK	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	OK	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	OK	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	OK	8.839	5.979	2.187
Eropa Barat					
54	Dakkar	OK	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	OK	10.281	7.848	6.818
Eropa Timur					
56	Addis Ababa	OK	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	OK	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	OK	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaaam	OK	8.947	6.599	5.733
60	Harare	OK	11.118	10.600	5.747
Afrika Selatan					
61	Windhoek	OK	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	OK	17.182	9.703	8.429
63	Jahannesburg	OK	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	OK	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	OK	12.943	9.802	7.216
Afrika Utara					
66	Algeirs	OK	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	OK	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	OK	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	OK	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	OK	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	OK	9.419	5.018	3.619
Asia Barat					
72	Manama	OK	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	OK	5.433	4.148	3.545
74	Amman	OK	7.561	6.431	3.545
75	Kuawait	OK	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	OK	7.703	4.490	3.730
77	Doha	OK	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	OK	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	OK	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	OK	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	OK	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	OK	6.446	3.785	3.321
83	Muscar	OK	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	OK	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	OK	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	OK	4.207	4.207	1.920
Asia Tengah					
87	Tashkent	OK	13.617	8.453	7.343

No	Kota	Satuan	Besaran		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
88	Astana	OK	13.661	12.089	8.962
89	Suva	OK	4.244	4.244	4.244
Asia Timur					
90	Beijing	OK	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	OK	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	OK	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	OK	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	OK	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	OK	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	OK	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	OK	3.122	2.749	1.304
Asia Selatan					
98	Kaboul	OK	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	OK	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	OK	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	OK	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	OK	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	OK	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	OK	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	OK	3.063	2.417	1.092
Asia Tenggara					
106	Bandar Seri Begawan	OK	1.628	1.147	919
107	Bangkok	OK	2.344	1.155	823
108	Davao City	OK	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	OK	747	491	350
110	Hanoi	OK	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	OK	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	OK	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	OK	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	OK	1.158	659	585
115	Kuching	OK	2.659	1.900	364
116	Manila	OK	2.453	1.614	1.150
117	Penang	OK	918	766	545
118	Phnom Penh	OK	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	OK	991	673	403
120	Viantiane	OK	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	OK	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	OK	1.894	1.427	694
123	Songkhla	OK	2.344	1.155	823
Asia Pasifik					
124	Canberra	OK	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	OK	6.689	4.900	2.964
126	Melbourne	OK	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	OK	6.940	5.917	1.916
128	Perth	OK	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	OK	17.090	13.835	8.252

No	Kota	Satuan	Besaran		
			Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
130	Suva		12.668	4.461	2.669
131	Sydney	OK	4.629	4.237	2.557
132	Vanimu	OK	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	OK	11.750	9.830	4120

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pangkat Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.